

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain sering kali terjadi ketidakharmonisan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada kekerasan. Suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan yaitu apabila tindakan tersebut telah melampaui atau bertentangan dengan batas – batas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan 28 UUD 1945 beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1). Tindakan kekerasan juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sebagai bentuk diskriminasi seperti yang tertera dalam Konvensi Tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindakan kekerasan. Sehingga korban dari tindakan kekerasan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh.

Oleh karena itu tindakan kekerasan berkaitan erat dengan hak seseorang. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak adalah apabila seseorang yang seharusnya dapat menikmati hidupnya dengan rasa aman atau jauh dari rasa takut, hal inilah merupakan hak dasar bagi setiap manusia pada umumnya.

Tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup serius. Tindakan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang sering terjadi di

masyarakat dan dapat menimpa siapa saja, tetapi sangat kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat dan juga para penegak hukum. Tindakan kekerasan ini merupakan sebuah fenomena global, karena peristiwa ini dapat terjadi di hampir seluruh belahan dunia bumi tanpa memandang status ekonomi, strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa.

Begitu juga di Indonesia, tindakan kekerasan sering kali terjadi karena budaya patriakal, dimana perempuan merupakan inferior dan laki – laki lebih superior. Dapat diartikan laki-laki mempunyai kekuasaan dalam semua aspek kehidupan yang lebih dominan dibandingkan perempuan, termasuk berkuasa atas diri perempuan tersebut. Pemahaman ideologi ini merasuk ke dalam pemikiran hampir semua laki- laki maupun perempuan melalui proses sosialisasi di masyarakat maupun dalam pendidikan.

Tindakan kekerasan pada perempuan jelas tidak menguntungkan bagi perempuan khususnya untuk beberapa hal, yaitu hilangnya rasa percaya diri perempuan yang pada akhirnya menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, mengganggu kesehatan baik fisik maupun psikis perempuan serta mengurangi aktivitas positif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Lebih jauh lagi, dapat berdampak kekerasan terhadap perempuan akan dirasakan dalam proses pembangunan, karena perempuan kurang dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai sumber daya manusia yang handal.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat beraneka ragam bentuknya. Namun secara sosiologis, bentuk kekerasan terhadap perempuan

yang dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain yaitu ,kekerasan fisik yang berupa penganiayaan bahkan pembunuhan dan sebagainya yang mengakibatkan penderitaan pada fisik perempuan tersebut. Kekerasan psikis yang berupa penghinaan, mengancam, mengucilkan dan sebagainya yang mengakibatkan rasa tertekan, trauma, rasa takut dan depresi yang mendalam. Kekerasan seksual yang berupa pelecehan seksual terhadap perempuan, memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh perempuan tersebut sehingga mengakibatkan turun atau hilangnya gairah seks karena rasa takut. Kekerasan ekonomi yang berupa tidak memberi nafkah, memaksa perempuan bekerja dan penghasilannya dikuasai laki-laki tersebut sehingga mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari – hari.

Kekerasan dalam masa pacaran merupakan tindakan yang dianggap tidak lazim, karena seorang pasangan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan dan mendatangkan penderitaan kepada pasangannya yang belum ada ikatan yang sah menurut hukum atau ikatan pernikahan. Penderitaan tersebut dapat berupa penganiayaan, ada pula bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan psikis yang berupa ancaman, perintah atau pemaksaan untuk melakukan atau menerima perlakuan dari pasangannya serta mengendalikan pasangannya dengan mengecilkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk *independent* secara tingkah laku. Selain itu terdapat pula bentuk kekerasan lainnya yang berupa penghancuran terhadap barang-barang milik pasangannya dan menghilangkan hak milik pasangannya.

Kekerasan fisik dalam masa pacaran sangat jelas tidak pantas dilakukan, namun faktanya masih banyak pasangan yang dalam masa pacaran telah melakukan tindak kekerasan fisik pada pasangannya. Kekerasan fisik dalam masa pacaran dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan –tindakan yang mendatangkan kerugian dan juga mengakibatkan penderitaan.

Menurut komnas Perempuan telah tercatat sekitar 1.299 kasus kekerasan yang menimpa perempuan Indonesia sepanjang 2010. Selain itu kekerasan oleh mantan pacar sebanyak 33 kasus¹. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pula data kasus-kasus kekerasan terhadap pacar yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan masuk ke Rifka Annisa sejak 1994 hingga 2007 mencapai 703 kasus². Adapun Untuk tahun 2008 saja, hingga November tercatat ada 19 kasus kekerasan dalam pacaran. Namun Jumlah kekerasan yang tidak dilaporkan jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan bahwa korban merasa iba bila pelaku kekerasan tersebut dilaporkan. Disisi lain korban enggan melaporkan karena korban masih membutuhkan pelaku sebagai pasangannya. Adapula korban yang menyatakan merasa malu dan akan membawa aib apa bila kasus kekerasan yang menimpa dibawa ke pihak yang berwajib.

Dalam kasus ini dimana perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik yang dilakukan pada masa pacaran yang dilakukan oleh pasangannya

¹<http://www.detiknews.com/read/2011/03/07/142711/1586046/10/komnas-catat-1299-kasus-kekerasan-dalam-pacaran-sepanjang-2010>, 17 09 2011 diunduh jam 01:05 PM

²<http://nasional.kompas.com/read/2008/12/19/18564931/kasus.kekerasan.dalam.pacaran.masih.cukup.tinggi>, 17 09 2011 di unduh jam 01:03 PM

sangat merugikan baginya. Namun disisi lain tidak adanya ketegasan dari dirinya sendiri untuk diselesaikan di jalur hukum dan sesungguhnya jumlah kekerasan yang tidak dilaporkan jauh lebih besar. Banyak faktor yang menyebabkan tidak terdeteksinya kekerasan fisik dalam masa pacaran, antara lain yaitu korban masih menginginkan pasangannya walaupun pasangannya itu telah sering kali melakukan kekerasan fisik, korban merasa malu apabila melaporkan dirinya sebagai korban kekerasan dalam masa pacaran, korban pula korban diancam oleh pasangannya agar tidak melaporkan kekerasan yang terjadi ke pihak yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian itu sangat diharapkan dapat menjadi memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum dalam implementasi perlindungan terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran.
- b. Manfaat praktisnya, antara lain;
 1. Bagi korban dan masyarakat pada umumnya, agar lebih peka dan berani untuk menindak-lanjuti perkara tersebut kepengadilan sehingga dapat meminimalkan kejadian yang sama dan mendapatkan perlindungan hukum.
 2. Bagi para penegak hukum, agar lebih aktif dan tegas dalam menyelesaikan perkara tindak kekerasan dalam masa pacaran sehingga korban dapat benar – benar terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum

E. Keaslian Peneliti

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan judul yang menjadi focus penelitian yang diangkat, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS KEKERASAN FISIK DALAM MASA PACARAN DI KOTA YOGYAKARTA” adalah asli sehingga dapat diyakini kebenarannya dan secara akademis dapat dibuktikan keasliannya.

1. Meggy Valentinne Lay, 02 05 08049, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Dan Viktimologi, Rumusan masalah Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga, bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak selaku kekerasan dalam keluarga. hasil penelitian faktor-faktor yang melatarbelakangi adalah faktor anak, faktor orang tua, faktor situasi keluarga yang kurang harmonis, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor profesi dan tempramen orang tua, faktor masa lalu orang tua, faktor sanksi yang masih dianggap ringan, faktor control social yang masih kurang dalam masyarakat, terhadap tindak kekerasan terhadap anak, faktor nilai-nilai social, faktor pemahaman yang keliru tentang ajaran agama, faktor peniru, faktor perkembangan teknologi dan pers, faktor kurangnya pengetahuan dari orang tua korban, bentuk. Perlindungan, terhadap anak selaku korban kekerasan, pemberian kasih sayang dan kebutuhan dasar anak, pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang terbaik, pemberian pelayanan kesehatan, perlindungan

hukum terhadap berbagai macam perlakuan diskriminatif dan salah,

2. Adhya Kartika, 04 05 08666, Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, judul Kekerasan Fisik Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Anak, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka anak, bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka anak, bagaimana sanksi yang diberikan kepada POLRI yang melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka anak, dampak apa yang akan ditimbulkan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka anak. hasil penelitian, faktor-faktornya adalah tersangka anak dalam memberikan keterangan terlalu berbelit-belit, tersangka dianggap tidak bias membuktikan sesuatu tindak pidana yang terjadi. bentuk-bentuk kekerasan adalah, menampar, memukul pada bagian kepala, perut, dan menendang. sanksi yang diberikan adalah, sanksi pidana, sanksi administrative,. dampak yang akan ditimbulkan adalah, cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional, menjadi penganiaya ketika dewasa, kematian trauma yang berkepanjangan.

3. Anggita Permatasari, 03 05 08491, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan,, rumusan masalah, bagaimanakah bentuk perlindungan hokum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan, kendala apa yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. hasil penelitian, perlindungan terhadap anak dalam masa penyidikan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang seperti pemberitahuan hak-hak anak, diberikan privasi bagi anak, adanya penyidik anak, pengacara untuk berbicara tanpa didengar. kendala yaitu kerangnya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan bagi anak dengan baik.

Berdasarkan pada hal diatas, dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum dengan judul tersebut di atas bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulis hukum ini terbukti melakukan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulis hukum mengenai “Implementasi Perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta” adalah:

1. Implementasi

Pelaksanaan atau penerapan

2. Perlindungan Hukum

Adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.

3. Perempuan

Adalah seorang wanita, orang yang bisa mengandung dan melahirkan anak.

4. Kekerasan Fisik

Adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang berupa penambakan, penamparan, penganiayaan, pemukulan, penyiksaan, pembunuhan

5. Masa Pacaran

Adalah proses pengenalan secara lebih dalam antara teman lawan jenis yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang demi hubungan yang lebih serius.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma yang berlaku dan hukum positif atau penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi titik tumpu pembahasan pada norma hukum yaitu menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

Peneliti di dalam penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif sehingga sumber data yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan sebagai data utamanya. Data yang digunakan dibedakan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum dimana mempunyai kekuatan yang berlaku mengikat seperti Undang – Undang Dasar dan Peraturan Perundang – undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sesudah amandemen terdapat pada Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1)
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 89, Pasal 90, Pasa 351, Pasal 352, Pasal 354 dan Pasal 355.

3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984),
Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap perempuan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum dimana bahan hukum ini sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang sudah ada. Bahan hukum sekunder antara lain adalah buku – buku, hasil penelitian berupa pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan kekerasan fisik terhadap perempuan, media internet agar memperluas pengetahuan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data di dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu: dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan berupa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dipilah – pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. Setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian di analisis dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, Sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. Kemudian data yang sudah dianalisis disajikan secara diskriptif, sedangkan metode penyimpulan menggunakan metode penyimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep serta metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Dalam bab ini bagian A berisi mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, menguraikan tentang pengertian perlindungan, hukum dan perlindungan hukum. Menguraikan tentang pengertian perempuan, undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, pengertian mengenai kekerasan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bentuk–bentuk kekerasan. Pengertian umum tentang

masa pacaran. Bagian B mengenai hasil penelitian tentang perlindungan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran Di Kota Yogyakarta, Perlindungan yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (RDU) atas Kekerasan Fisik dalam Masa Pacaran dan Perlindungan yang diberikan oleh POLRESTA Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran di Kota Yogyakarta.

. BAB III : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penulisan yakni Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran di kota Yogyakarta dan saran yang diharapkan dapat digunakan oleh korban sebagai warga masyarakat, Khususnya para aparat penegak hukum dalam pemberian rasa keadilan bagi warga masyarakat.